

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta.
- Anggara, Sahya, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tjandra, WR, & SH, M (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.*, books.google.com.
- Simamora, YS, Kurniawan, F, Abrianto, BO, & Amalia, R (2021). *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.*, books.google.com.
- Farida Patinggi, dkk, 2021, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam system ketatanegaraan*, Litera, Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad jusuf, 2014, *hukum kejaksaan eksistensi kejaksaan sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara*, laksbang jutitia, Surabaya.
- Aisyah, R. H. S., & SH, M. (2019). *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*. Jakad Media Publishing.
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- P.P. craigh, *administrative law*, Thompson Sweat & Maxwell, Fifth Edition, London, 2003.
- Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, 2008, SH., MH, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2003, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1990, *pokok-pokok hukum administrasi negara*, cetakan kedua, Jakarta: ghalia Indonesia. hal 10

Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

M. Yusuf Jhon dan Dwi Setiawan, 2009, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemitro Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

B. Jurnal

Dita Mahandari dan I Nyoman Gede Remaja, 2019, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Masalah Hukum Pemerintah Daerah*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1.

Faniyah, I, & Tanjung, A (2022). Pendampingan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Pariaman Kepada Pemerintah Kota Pariaman Pada Proyek Strategis Untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran *UNES Law Review*, review-unes.com.

Evy Lusya Ekawati, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata; Sudi Kasus Penyelesaian Tunggakan Listrik Antar Pelanggan Dengan Perusahaan Listrik Negara*, Yogyakarta: Genta Press.

Juliani Henny, 2019, *Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*, Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, November 2019, ISSN 2621-2781.

Natalia Nilamsari, 2014, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Studi Dokumen No 2 Vol. XIII, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Setiawan, A (2019). *Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara*. Jurnal Hukum & Pembangunan, academia.edu.

Baswir, R (1998). *Kendala Pengawasan Keuangan Negara*. Unisia, journal.uui.ac.id.

Aisyah, RHS, & SH, MH (2019). *Sistem Pengawasan Keuangan Negara*, books.google.com.

Boboy, A, Yohanes, S, & Sinurat, A (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Bidangpublish.ojs-indonesia.com*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang Jasa Pemerintah.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep- 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang administrasi perkara perdata dan tata usaha negara.

D. Internet

<https://investigasi.news/fokus-investigasi/tim-pendamping-proyek-sport-center-mundur/> diakses pada tanggal 3 september 2024 pada pukul 17.00 WIB

www.kbbi.web.id Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 3 september 2024 pada pukul 17.10 WIB

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/yNL1gV9b-kpk-90-kasus-korupsi-terkait-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada 19 april 2024 pukul 16.42 WIB

https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang diakses pada 19 april 2024 pukul 17.00 WIB

<https://lpse.padangpanjang.go.id/eproc4> Diakses pada Tanggal 2 Januari 2025 Pada pukul 16.20 WIB

